



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

LESTARI BRIEF

LESTARI Brief No. 07 | 28 Oktober 2016



USAID LESTARI

PEMBANGUNAN KANAL SEBAGAI ANCAMAN RESTORASI LAHAN GAMBUT

Penulis: Suhardi Suryadi

Editor: Erlinda Ekaputri

PENGANTAR

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terutama di area gambut selama 10 tahun terakhir secara nyata telah membuat kerusakan ekologis yang sangat besar dan menurunkan kualitas kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Sehingga mendorong perhatian dunia untuk membantu mencari fokus permasalahan dan penyelesaiannya. Pada bulan Desember 1997, WWF mengeluarkan sebuah laporan berjudul "*Tahun Dunia Terperangkap Api*". Claude Martin, Direktur Jenderal WWF, mengatakan: "*Ini bukan hanya keadaan darurat, namun merupakan bencana planet. Ketika kesalahan telah*

dapat diidentifikasi dan kemudian menyalahkan satu sama lain, maka yang mendesak adalah memastikan adanya respon secara nasional dan internasional dibanding mencari kambing hitam. Saling menyalahkan seperti ini diharapkan tidak terjadi lagi¹."

Kebakaran lahan gambut telah menjadi perhatian internasional dalam beberapa tahun terakhir sebagai isu lingkungan dan ekonomi, terutama setelah adanya El Niño Southern Oscillation (ENSO) hingga mengakibatkan sekitar 25 juta hektar lahan di seluruh dunia terkena dampak kebakaran. Hal ini mengisyaratkan kebakaran dianggap sebagai ancaman

¹ *Andy Rowell and Dr. Peter F Moore, Global Review of Forest Fires, WWF – IUCN,*

potensial bagi pembangunan berkelanjutan karena efeknya berpengaruh secara langsung pada ekosistem, kontribusi emisi karbon dan dampaknya bagi keanekaragaman hayati. Polusi dari kabut asap adalah masalah berulang bahkan tanpa adanya ENSO sekalipun, terutama untuk Indonesia². Sejak ENSO tahun 1998 dan 2002, kebakaran lahan hutan Indonesia tergolong paling parah di dunia, dengan masalah yang sama pada peristiwa kebakaran pada tahun 2014-2015.

Meskipun beberapa penelitian tentang kebakaran hutan dan lahan telah banyak dilakukan, namun kemajuan dalam mengatasi masalah dalam kasus di Indonesia banyak menghadapi hambatan. Bentuk hambatan itu antara lain adalah kebingungan dalam memahami kebijakan yang ditentukan pemerintah, kurangnya kesungguhan dalam memahami dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan, serta kurangnya koordinasi dan kerjasama antar pihak dalam melakukan tindakan untuk mengatasi kebakaran.

MASALAH DAN TANTANGAN

Selain faktor alam (cuaca iklim) maka pemicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) gambut adalah ulah manusia dalam bentuk pembakaran sengaja lahan dan pembangunan kanal baru yang terencana. Studi UGM Tahun 2015 di sejumlah lokasi menunjukkan bahwa dengan pembangunan kanal-kanal baru justru memicu bertambahnya titik api; studi lain mengindikasikan bahwa makin dekat kanal makin banyak titik api. Namun yang ironis pembangunan kanal baru atau pelebarannya oleh pemerintah justru terus berlangsung di sejumlah wilayah kabupaten seperti kasus pembangunan kanal oleh Pemerintah Kota Palangka Raya yang telah menuai banyak kritik dan penolakan dari LSM dan masyarakat petani karena dianggap kurang tepat dalam membantu restorasi gambut³

Pemerintah beralasan bahwa pembangunan ka-

nal baru dimaksudkan untuk “normalisasi” sungai / saluran air agar tidak mengakibatkan banjir di lahan-lahan pertanian warga. Sepintas tujuan dari pembangunan kanal ini sangat mulia dalam kerangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan kesejahteraan petani. Padahal dalam faktanya kanal baru justru membuat lahan petani cepat kering dan mudah terbakar. Hal ini tidak terlepas dari rusaknya kubah gambut yang tercerabut ketika proses pengerukan berlangsung. Padahal kubah gambut merupakan unit ekosistem gambut yang berfungsi dalam mengatur tata air pada musim kemarau dan penghujan. Sehingga tanpa adanya pembangunan kanal sekalipun, fungsi “normalisasi” dapat diperankan oleh kubah gambut secara alami.

Masalah pembangunan kanal sebagai pemicu kebakaran pada dasarnya sudah lama diidentifikasi oleh para ahli. Dalam pertemuan para ahli gambut bertema "**Solusi Komprehensif Pasca Kebakaran dan Kerusakan Ekosistem Gambut**" yang dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengemuka bahwa keberadaan kanal-kanal baru di lahan gambut untuk kegiatan pertanian merupakan cikal bakal terjadinya kebakaran lahan di area itu. Kanal membuat air di gambut mengalir dan terbuang ke sungai. Karena itu, pemerintah diharapkan menjamin penghentian pembuatan kanal baru di lahan gambut, serta membuat lahan yang terlanjur berkanal tetap basah.⁴

Direktur Wetlands International Indonesia Nyoman N Suryadiputra menjelaskan, langkah prioritas yang mesti dilakukan pemerintah adalah memastikan tak ada lagi pembuatan kanal untuk mengeringkan gambut. Mengingat setiap hektar lahan konsesi untuk pertanian dan perkebunan sekurang-kurangnya membutuhkan kanal sepanjang 200 meter. Jika satu konsesi terdiri atas 5.000 hektar lahan gambut, maka panjang saluran kanal yang dibangun dapat mencapai 1.000 km. Perkiraan total panjang kanal saat ini 2 juta km, karena 10 juta hektar

² Luca Tacconi, *Fires in Indonesia : Causes, Cost and Policy Implication*, CIFOR Occasional Paper No. 38

³ Kompas, 13 Oktober 2016

⁴ Kompas 28 September 2015

lahan gambut dipakai untuk pengusahaan akasia, perkebunan kelapa sawit, dan pertanian rakyat. Lahan gambut sama dengan rawa berisi sampah organik berusia ribuan tahun. Sekitar 80-90 persen komponen gambut terdiri atas air. Pada kondisi alami, gambut tergenang air dan sulit terbakar. Namun, sekali air dikuras lewat pembangunan saluran atau kanal, gambut akan kering dan mudah terbakar.

Memang tidak dipungkiri bahwa kondisi kanal-kanal di lahan gambut kurang berfungsi dengan baik untuk mendukung pengairan pada lahan pertanian. Disamping banyak ditumbuhi rumput dan pohon, juga adanya perubahan tutupan perluasan lahan oleh masyarakat yang mengakibatkan kanal mengalami penyempitan dan pedangkalan. Sehingga keberadaan kanal secara parsial dinilai kurang optimal fungsinya dan perlu diperlebar dan diperdalam. Pemerintah acapkali menggunakan kaca mata kuda dalam melihat keberadaan kanal dengan perspektif semata-mata fisik. Sementara aspek ekologis dan sosial-ekonomi sering diabaikan. Dengan kanal diperdalam hingga 4 meter, petani menjadi kesulitan untuk mencuci sayur karena harus turun ke bawah. Bahkan sayur akan kekurangan air ketika kemarau panjang. Selanjutnya, tingkat air yang terlalu menurun akan mengganggu pula tanaman perkebunan dan kehutanan seperti karet, kelapa sawit, jelutung, serta buah-buahan.

Secara umum kondisi hidrologi lahan gambut pada dasarnya mencerminkan suatu keseimbangan air antara sumber (pasokan) air yang hanya berasal dari air hujan dengan pemanfaatan air untuk lahan. Sistem hidrologi (tata air) sangat menentukan kelestarian lahan dan jasa lingkungannya untuk perkembangan ekonomi pertanian, perkebunan dan kehutan. Sebagai contoh, pembukaan lahan gambut sejuta hektar tahun 1995 melalui pembuatan saluran primer induk (SPI) sepanjang 187 kilometer yang menghubungkan Sungai Kahayan, Sungai Kapuas dan Sungai Barito serta

memotong cukup banyak anak sungainya berakibat pada berubahnya pola tata air dan kualitasnya, dengan konsekuensi negatif bagi kegiatan pertanian, perkebunan dan kehutanan⁵. Pembuatan kanal-kanal tersebut telah membongkar lapisan gambut, yang bukan saja menjadi penyebab kebakaran melainkan juga mengeluarkan senyawa pirit yang bersifat racun pada lahan.

Memang pembasahan kembali lahan gambut diperlukan sebagai upaya dini untuk pencegahan kebakaran dalam skala luas dengan mendayagunakan jejaring kanal yang ada melalui penyekatan kanal secara menyeluruh dan terpadu (dengan sistem “by-pass” agar perahu kecil tetap dapat melewati kanal, dan membangun “spillway” untuk menghindari banjir). Tanpa harus membangun kanal baru atau memperlebar/memperdalamnya, pembasahan kembali lahan gambut kelak dapat membawa dampak positif untuk ekologis dan ekonomi masyarakat serta perkebunan di wilayah sekitarnya. Misal saja, dengan pembasahan di kawasan lindung, terutama punggungan dan kubah gambut, akan mendukung pemulihan alami dan penyediaan cadangan air sepanjang musim. Termasuk melindungi kawasan lindung dan budidaya pertanian dan perkebunan dari limpahan air permukaan pada curah hujan tinggi dan musim kemarau panjang.

Pembangunan kanal sebagaimana terjadi di sektor lain senantiasa menampilkan dua sisi yang paradoks. Pada satu sisi merupakan *asset* yang menjanjikan perubahan dalam kesejahteraan masyarakat. Sementara di sisi lain menjadi *liability* yang justru dapat mematikan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Karenanya, banyak kasus dari pembangunan sekat kanal yang akhirnya dibongkar karena bentuk, penempatan dan fungsinya tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat (sekat tepat, perahu kecil bisa lewat, banjir terkendali dengan adanya jalur limpahan air/ “spillway”).

⁵ *Master Plan 2008 dan Kajian Cepat Hidrologi Lahan Gambut Kawasan Hidrologis Gambut # 14, Blok C Eks-PLG, Proyek LESTARI – Usaid, September 2016*

Menurut Susan Page dari University of Leicester, 2016, lahan gambut yang mengalami deforestasi dan pengeringan berada pada tingkat risiko kebakaran tertinggi karena permukaannya yang kering akibat dari lahan gambut terdrainase⁶. Kondisi lahan seperti ini sangat mudah terbakar baik karena faktor yang disengaja oleh aktivitas pembukaan lahan maupun karena iklim yang sangat panas. Selain itu, apabila lahan gambut terlalu lama kering maka akan mengubah sifat serap air (hydrophilik) menjadi menolak air (hydrophobik) dan dengan demikian meningkatkan risiko banjir saat hujan deras.

Hal ini memberi isyarat bahwa sangat penting untuk tidak bersifat pragmatis dalam pembangunan kanal yaitu semata-mata membelanjakan anggaran yang sudah ada dengan mengkalkulasinya secara matematis, teknis dan logis. Tetapi sebaliknya, pembangunan kanal mutlak mengedepankan dimensi kemanusiaan dan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup sebagai jasa pendukung bagi pertumbuhan ekonomi pertanian, perkebunan dan kehutanan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Upaya pemerintah dalam mengurangi dan bahkan menghentikan kebakaran lahan dan hutan di area gambut pada dasarnya sudah

maksimal. Pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) sebagai lembaga yang mengkoordinir kegiatan pengelolaan gambut antar instansi merupakan inisiatif yang positif dalam konteks percepatan kegiatan pemulihan gambut. Demikian pula inisiatif masyarakat dalam mengembangkan kegiatan pengolahan lahan tanpa bakar (PLTB), pembuatan sumbor dan sekat-sekat kanal telah mulai berjalan, sekalipun masih dalam skala kecil.

Namun demikian, upaya-upaya pemerintah dan masyarakat yang sudah berjalan menjadi tidak berarti dalam kerangka restorasi lahan gambut manakala kegiatan pembangunan atau normalisasi (pelebaran dan pendalaman) kanal tidak dapat dihentikan. Ketegasan pemerintah untuk memastikan tidak adanya pembangunan kanal baru dari pihak manapun adalah suatu keniscayaan. Sehingga jika ada hukuman bagi petani yang melakukan pembakaran untuk membuka lahan, maka membangun kanal baru juga sepatutnya dihentikan dan pelakunya dikenai sanksi. Hal ini didasari bahwa keduanya menjadi penyebab dari kebakaran lahan dan hutan di ekosistem gambut. Paradigma gambut lestari tidak hanya terdiri dari pelarangan penggunaan api melainkan juga pelarangan pembangunan kanal -- *stop api, stop kanalisasi!* Jika tidak, target restorasi gambut seluas 2 juta hektar selama 5 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah dikuatirkan tidak tercapai

Publikasi ini dibuat dengan dukungan dari Rakyat Amerika Serikat melalui *United States Agency for International Development (USAID)*. Isi dari publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tetra Tech dan tidak mencerminkan pandangan USAID atau Pemerintah Amerika Serikat.

⁶ Prof. Susan Page, *Memahami Dinamika Kebakaran Lahan Gambut di Indonesia*, Jurnal Lestari, Edisi Perdana, Halaman 8, Tahun 2016